

## Habitiasi Subkultur Tionghoa di tengah Dominasi Melayu Bangka: Politik Berbagi Peran

Ibrahim Ibrahim <sup>\*1, </sup>, Arief Hidayat <sup>2, </sup>, dan Herza Herza <sup>3, </sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada,  
55281, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

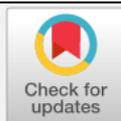
<sup>3</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

\* Korespondensi: [iim\\_babel@yahoo.com](mailto:iim_babel@yahoo.com)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



#### Sitasi Cantuman:

Ibrahim, I., Hidayat, A., & Herza, H. (2022). Habituation of Chinese Subculture amid Bangka Malay Domination: The Role-sharing Politics. *Society*, 10(2), 255-270.

DOI: [10.33019/society.v10i2.424](https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-  
NonKomersial-BerbagiSerupa  
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 2 Oktober, 2022;

Diterima: 25 Oktober, 2022;

Dipublikasi: 2 November, 2022;

### ABSTRAK

Etnis Tionghoa merupakan etnis yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Pulau Bangka. Hubungan yang harmonis antara etnis Tionghoa dan penduduk lokal menunjukkan bahwa proses habituasi berjalan dengan baik sehingga keberadaan mereka diterima sebagai realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi di kabupaten/kota di Pulau Bangka. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan etnis Tionghoa telah diproses melalui penguatan empat modal utama etnis Tionghoa (pandangan Bourdieu): modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Penguasaan modal telah mendorong politik berbagi peran yang baik karena penguasaan modal dilakukan secara transformatif. Tidak mengherankan bahwa subkultur minoritas Tionghoa meski dalam banyak hal terasa dominan, masih bisa diterima sebagai realitas sosial yang membentuk harmoni antarkultur di pulau Bangka.

**Kata Kunci:** Bangka; Habitiasi; Melayu; Modal; Tionghoa

## 1. Pendahuluan

Etnis Tionghoa telah lama dikenal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Pulau Bangka. Secara historis, etnis Tionghoa di Pulau Bangka sudah ada sebelum keberadaan Indonesia. Sejarah kedatangan etnis Tionghoa sejalan dengan migrasi akibat penambangan timah. Timah sebagai komoditas penting selain rempah-rempah menjadi daya tarik tersendiri bagi penguasa Malaka dan Kesultanan Palembang (Heidhues, 2008; Darwance *et al.*, 2018; Erman, 2007; 2008; 2009). Mereka yang datang umumnya adalah pekerja terampil di bidang pengolahan logam. Pekerja dari Guangdong, Tiongkok, dianggap lebih baik dalam pengolahan dan penambangan timah yang mulai berkembang menjadi komoditas pada abad ke-17 (Heidhues, 1992; 2008). Tidak heran jika pada masa penjajahan banyak produksi timah dari Pulau Bangka karena eksploitasinya melibatkan penambang dari Tiongkok (Erman, 2017).

Orang Tionghoa merupakan etnis minoritas di pulau Bangka, meski banyak sumber menyebutkan bahwa mereka adalah etnis yang sudah lama mendiami kepulauan ini. Sejarah kedatangan etnis Tionghoa hampir identik dengan sejarah kedatangan masyarakat Melayu dari sekitar Bangka, antara lain Palembang, Sumatera, Johor, dan Kepulauan Riau. Secara umum etnis Tionghoa telah lama mendiami daerah bandar, antara lain Pangkalpinang, Muntok, Toboali, Belinyu, Sungaliat di pulau Bangka, serta Tanjung Pandan dan Manggar di pulau Belitung. Mungkin sejarah kedatangan orang Tionghoa di Pulau Bangka adalah sejarah awal kedatangan orang Tionghoa di Indonesia. Diketahui bahwa orang Tionghoa telah lama menjalin hubungan dengan Nusantara (istilah atau nama untuk seluruh kepulauan Indonesia), bahkan sebelum dan pada masa kolonialisme (Siem, 2017; Suharnomo, 2017).

Keberadaan etnis Tionghoa di Pulau Bangka yang telah berlangsung berabad-abad, khususnya di Pangkalpinang, dibuktikan dengan adanya kompleks pemakaman Tionghoa yang diklaim terbesar di Asia Tenggara. Kompleks pemakaman dengan luas kurang lebih 20 hektar ini menyiratkan simbol dominasi subkultur minoritas Tionghoa. Tanah pemakaman milik orang Melayu hanya 3-5 hektar. Luasnya area pemakaman menyiratkan kekuasaan yang kuat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Tionghoa di era kolonial dan kemerdekaan dengan menyiratkan simbol luasnya penguasaan tanah. Tionghoa menjadi subkultur yang unik di tengah budaya Melayu yang dominan. Menurut Zaenudin (2016), subkultur dipahami sebagai kelompok yang membentuk identitasnya sendiri di tengah eksistensi yang minor dari sebuah budaya besar.

Posisi dominan lainnya di pulau Bangka adalah menguasai pusat kegiatan ekonomi, yang pada umumnya didominasi oleh orang Tionghoa. Perusahaan, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya, bahkan jaringan pelabuhan timah, umumnya dipegang oleh orang Tionghoa (Ibrahim, 2013). Kondisi ini menyiratkan bahwa etnis Tionghoa memiliki hubungan yang dominan dalam suatu bidang dibandingkan dengan etnis Melayu yang secara kuantitatif lebih dominan. Namun, dominasi etnis Tionghoa atas Melayu di Bangka tidak muncul sebagai sesuatu yang konfrontatif. Menariknya, ketika kekerasan terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya pada tahun 1998, banyak korbannya adalah etnis Tionghoa, dan kejadian itu tidak terjadi di pulau Bangka. Tidak ada orang Tionghoa yang diganggu, dan tidak ada toko atau tempat usaha milik etnis Tionghoa yang dirusak atau bahkan dibakar massa. Meskipun terjadi demonstrasi di Muntok, Tanjung Pandan, dan Pangkalpinang, menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi muda yang terbentuk pada pertengahan November 2001. Sebelumnya, Bangka Belitung merupakan satu kesatuan pemerintahan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pemekaran wilayah ini diawali dengan maraknya tuntutan otonomi daerah yang digulirkan pada masa reformasi. Dalam proses

menjadi provinsi yang mandiri, Bangka Belitung berkembang dengan segala perbedaan etnis, kultur, dan berbagai kekayaan lainnya yang berlangsung secara simultan. Kerukunan hidup berbagai etnis di pulau Bangka belum mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa semua itu bisa terjadi.

Selanjutnya, bagaimana masa depan harmonisasi ini di tengah kontestasi peran yang saling mendominasi, terutama yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di pulau Bangka? Penjelasan sementara hadir secara historis dengan perasaan berbagi nasib yang sama sebagai penduduk terjajah (Sya *et al.*, 2019). Namun ikatan ini terbantahkan dengan adanya perlakuan kelas dua bagi etnis Tionghoa di daerah lain di Jawa dan daratan Sumatera.

Penelitian ini mencoba membedah bagaimana modal yang dimiliki etnis Tionghoa di Pulau Bangka dapat mendukung adanya harmonisasi antara etnis Tionghoa dan pribumi di Nusantara ini. Terminologi masyarakat lokal atau masyarakat adat yang akan digunakan secara bergantian dalam penelitian ini mengacu pada penduduk dengan sejarah sejarah pada akar sejarah etnisitas nusantara, tidak mengacu pada konteks pembedaan orang lain. Penelitian ini juga melihat bagaimana hubungan antara dominasi etnis dan kontestasi terjadi melalui pendekatan modal yang dikemukakan oleh Bourdieu (1990). Bourdieu membuka tradisi baru dalam dinamika sosial yang absurd antara individu dan masyarakat (Bourdieu, 1990). Untuk mengatasi kontradiksi ini, Bourdieu memilih untuk menggunakan cara berpikir rasional (Swartz, 1997) bahwa struktur objektif dan representasi subjektif, agen dan perilaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal balik atau dualitas (Giddens, 1997; Priyono, 2002). Keduanya tidak saling menyangkal tetapi terpaut dalam praktiknya.

Bourdieu sendiri menjelaskan bahwa habitus merupakan dasar terbentuknya ranah, sedangkan di sisi lain ranah menjadi fokus pelaksanaan habitus. Ranah merupakan arena kekuasaan yang di dalamnya terdapat upaya perebutan sumber daya (modal) dan memperoleh akses tertentu pada hierarki kekuasaan. Bourdieu menggunakan modal untuk memetakan hubungan kekuasaan masyarakat (Fashri, 2007, p. 97). Dalam konsep modal Bourdieu, setidaknya ada 4 (empat) klasifikasi modal, termasuk modal ekonomi, yang mengacu pada alat-alat produksi yang mudah digunakan untuk semua tujuan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya; modal sosial mengacu pada jaringan sosial yang dimiliki mengenai pihak lain yang memiliki kekuasaan; modal budaya, yang meliputi semua kualifikasi intelektual yang dapat dihasilkan melalui pendidikan formal atau warisan keluarga, dan; modal simbolik yang meliputi segala bentuk prestise, status sosial, otoritas dan legitimasi (Fashri, 2007). Dengan pendekatan kapital ini, diharapkan akan muncul perspektif baru dalam mendukung hadirnya harmonisasi di tengah kontestasi dominasi. Dibutuhkan banyak elemen yang memperkuat dan mereduksi berbagai elemen pembeda untuk menciptakan bangunan keluarga yang kokoh yang telah ada selama ini di pulau Bangka.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pola eksploratif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung ketika penelitian dilakukan dan meneliti penyebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena dan menghasilkan generalisasi yang diturunkan dari proses induktif tentang kelompok, proses, aktivitas, atau situasi yang sedang dipelajari (Given, 2008; Umar, 2011; Bakhri & Hanubun, 2019). Dalam penelitian ini, yang digambarkan secara eksploratif dengan logika generalisasi adalah bagaimana proses habituasi subkultur Tionghoa terjadi di tengah masyarakat mayoritas Melayu.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi, dengan subjek penelitian adalah masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi di pulau Bangka. Pengumpulan data dilakukan mulai November 2021 hingga Juni 2022. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, di mana tiga alur kegiatan analisis akan dilakukan secara simultan dan fleksibel: reduksi data, penyajian data, analisis, penarikan kesimpulan, dan triangulasi (Cresswell, 2017; Miles & Huberman, 2014).

### **3. Identitas Tionghoa dalam Dominasi Melayu Bangka**

Identitas merupakan salah satu penanda yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang memiliki latar belakang, budaya, atau karakteristik yang sama. Penanda identitas ini muncul sebagai unit kolektif untuk mencerminkan kesamaan (Ibrahim, 2013). Penanda utama masyarakat Melayu adalah mereka berasal dari garis keturunan dan nenek moyang yang sama, misalnya dari Sumatera dan Malaka.

Meski etnis Tionghoa di Bangka adalah minoritas, mereka tidak mendapatkan represi atau perlakuan diskriminatif. Setidaknya terbukti dengan hadirnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini setidaknya muncul dari komitmen kuat kelompok etnis yang dianggap mayoritas, yakni etnis Melayu, yang memberikan ruang maksimal dan tidak memiliki batasan dalam berbagai hal. Selain itu, etnis Tionghoa yang merupakan keturunan nenek moyang mereka yang datang ke Bangka sebagai buruh tambang menganggap pulau Bangka sebagai tanah air kedua mereka. Mereka yang saat ini dianggap sebagai generasi ketiga dan keempat telah menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka.

Sebagian besar informan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir untuk kembali ke Republik Rakyat China (RRC). Bahkan rata-rata mereka yang hidup sekarang sudah tidak tahu lagi tentang kakek atau keluarga orang tuanya dari tanah leluhurnya, Tiongkok. Ditambah fakta bahwa banyak etnis Tionghoa di Bangka yang menikah dengan etnis Melayu. Pernikahan ini membuat rasa nasionalisme lokal mereka semakin kuat. Tentu saja, perkawinan yang kemudian melahirkan keturunan tentu saja akan menimbulkan anggapan dari orang Melayu atau pribumi bahwa mereka adalah "orang kita".

Disampaikan Edi Santoso Ngui, yang bernama asli Fu Ciong, 50 tahun, warga Dusun Songhin, Desa Jurung, Kabupaten Bangka, mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk kembali ke tanah leluhurnya, yakni Tiongkok. Bahkan untuk liburan, menurut mereka, hal itu tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Bagi mereka, menjadi orang Indonesia seutuhnya adalah suatu keharusan. Bahkan anak-anaknya tidak lagi terobsesi untuk belajar bahasa Mandarin sebagai bahasa nenek moyang mereka.

Adapun sejarah, awal kedatangan pekerja timah dari Guangdong, Tiongkok, ke pulau Bangka tidak termasuk istri atau keluarga perempuan, tetapi hanya laki-laki yang datang. Laki-laki pekerja ini kemudian menikah dengan perempuan Melayu dan seterusnya. Silsilah perkawinan ini memunculkan istilah kekerabatan baru yang lebih erat antara Melayu dan Tionghoa. Peleburan identitas ini sebagai konsekuensi terputusnya hubungan dengan Tiongkok. Praktis mereka yang menikah dengan orang Melayu biasanya tidak lagi melestarikan tradisi leluhurnya dan terbawa oleh tradisi Melayu. Misalnya, yang paling terlihat adalah mudarnya bahasa Mandarin, beralihnya agama leluhur dan tidak adanya tradisi sembahyang kubur bagi mereka yang telah melebur dengan masyarakat Melayu.

Afing, salah satu informan dari Desa Pelangas, Kabupaten Bangka Barat, mengaku seperti warga kebanyakan. Dia memang tinggal di daerah di mana ada banyak orang Melayu. Mereka berteman dan menikah antar etnis. Bahkan Afing mengatakan dia berbicara bahasa Pelangas setiap hari.

*“Saya hobi berburu burung dan tupai dengan teman orang Melayu, otomatis bahasa dan karakter saya seperti mereka” (Afing, wawancara).*

Dari segi kepercayaan juga dapat dilihat bahwa Pulau Bangka terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Enam agama dan kepercayaan yang diakui secara resmi oleh negara ada di provinsi ini. Agama Konghucu dan Budha adalah agama awal pendatang etnis Tionghoa di Pulau Bangka. Mereka kemudian, dengan pemahamannya masing-masing, menikah dengan orang Melayu yang cenderung beragama Islam, atau pendatang dari etnis lain yang beragama Kristen atau Katolik. Perpindahan agama di pulau Bangka bukanlah persoalan yang problematis. Namun, dibalik apa yang ditampilkan, ada rasa kontestasi identitas, dimana etnis Tionghoa belajar dari peristiwa di daerah lain yang meminggirkan dan tidak mengakui Tionghoa sebagai warga negara yang juga memiliki hak sesuai dengan janji negara dalam hukum. Di banyak tempat, terjadi kerusuhan dengan latar belakang perbedaan agama dan etnis. Tidak jarang mereka yang berasal dari etnis Tionghoa didiskriminasi bahkan secara represif mendapat perlakuan tidak manusiawi karena tidak adanya pengakuan dari negara.

**Tabel 1. Statistik Pemeluk Agama di Kepulauan Bangka Belitung**

Kabupaten/Kota	Religions							Total
	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran Kepercayaan	
Bangka	270.846	7.485	3.650	29	26.252	7.031	1.759	317.052
Belitung	155.257	2.727	1.142	759	9.014	147	7	169.053
Bangka Selatan	170.721	1.187	723	231	1.496	2.299	1	176.658
Bangka Tengah	159.581	4.713	4.664	41	6.462	6.814	11	182.285
Bangka Barat	181.378	2.848	953	27	8.254	3.597	9	197.066
Belitung Timur	118.554	1.569	405	3	3.380	163	5	124.079
Pangkalpinang	177.317	8.179	7.164	64	12.860	7.966	23	213.573
<b>Total</b>	<b>1.233.654</b>	<b>28.708</b>	<b>18.701</b>	<b>1.154</b>	<b>67.718</b>	<b>28.017</b>	<b>1.815</b>	<b>1.379.767</b>

Sumber: babel.kemenag.go.id (2018)

Secara budaya, identitas orang Tionghoa di Pulau Bangka dapat digolongkan menjadi dua kelompok utama, yaitu Totok dan Peranakan (Ibrahim, 2013; Nugroho, 2013; Reid, 2009). Totok adalah orang Tionghoa yang memiliki hubungan langsung dengan nenek moyang mereka di Tiongkok, biasa disebut generasi Tionghoa awal. Pada saat yang sama, Peranakan melekat pada orang Tionghoa yang telah bercampur dengan etnis lain atau meninggalkan budaya leluhurnya. Orang Tionghoa Totok sangat memegang teguh tradisi dengan melestarikan tradisi leluhurnya, misalnya dengan berbahasa Mandarin, melestarikan Sembayang Hio, mengunjungi makam leluhur, dan merayakan adat dan budaya Tionghoa.

Sedangkan bagi orang Tionghoa Peranakan, mereka dapat berinteraksi dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan etnis lain di luar Tionghoa. Bahkan ada yang menikah dengan etnis lain di pulau Bangka. Beberapa bahkan tidak menguasai bahasa leluhur mereka Mandarin, mengubah keyakinan mereka, dan tidak lagi Konghucu. Secara umum, mereka mulai melepaskan identitas Tionghoa mereka.

Etnis Tionghoa di pulau Bangka pada mulanya adalah penambang timah. Magnet utama inilah yang mendorong mereka untuk datang. Selanjutnya dengan terbukanya lapangan usaha lain dan kebijakan negara yang lebih akomodatif terhadap orang Tionghoa, umumnya mereka mencoba untuk lebih masuk ke dunia usaha. Dunia politik bagi etnis Tionghoa di pulau Bangka pada awalnya merupakan bidang yang dijauhi. Bahkan bagi sebagian orang Tionghoa, ingatan akan kekerasan politik yang mereka rasakan pada masa Orde Baru masih membekas

(Aryodiguno, 2018; Brahma, 2018; Cribb & Copel, 2009). Pada musim pemilu, baik secara nasional maupun lokal, tingkat partisipasi cenderung minim, terutama bagi etnis Tionghoa yang tinggal di pedesaan. Namun, periode itu berubah setelah reformasi (Turner, 2003; Turner & Allen, 2007). Secara statistik, banyak etnis Tionghoa yang kini berada di Bangka dan Belitung menduduki jabatan strategis sebagai kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keterbukaan lapangan politik bagi etnis Tionghoa tidak lepas dari minimnya sentimen etnis dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dari statistik pemilih, pemilih Melayu lebih banyak daripada etnis Tionghoa. Bangka Belitung dinilai sangat mapan dari segi modal politik etnis Tionghoa. Lahan etnis Tionghoa yang semakin terbuka ini membuat etnis Tionghoa semakin terakomodasi dan diakui di masyarakat. Selain itu, dalam bidang politik yang biasanya didominasi oleh orang Melayu, banyak politisi yang berasal dari etnis Tionghoa. Menariknya, mereka yang menduduki jabatan eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah tidak menegaskan kepentingan khusus etnis Tionghoa tetapi bertindak sebagai wakil atau pemimpin yang melindungi seluruh masyarakat Bangka Belitung.

**Table 2. Beberapa Tokoh Tionghoa dari Bangka Belitung dan Perannya**

No.	Nama	Jabatan
1	Lim Tau Kian	Sesepuh Tionghoa
2	Toni Wen	Sesepuh Tionghoa
3	Amung Tjandra	Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi
4	Basuki Tjahaya Purnama	Mantan Bupati Belitung Timur
5	Basuri Tjahaya Purnama	Mantan Bupati Belitung Timur
6	Rudianto Tjen	Anggota DPR RI
7	Hidayat Arsani	Mantan Wakil Gubernur
8	Eko Wijaya	Anggota DPR RI Periode Tahun 2014-2019
9	Bambang Patijaya	Anggota DPR RI Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2019-2024
10	Bong Ming Ming	Wakil Bupati Bangka Barat
11	Me Hoa	Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah
12	Bahar Buasan	Anggota DPD RI Periode Tahun 2014-2019
13	Alex Fransiskus	Anggota DPD RI Periode Tahun 2020-2024
14	Isyak Meirobi	Wakil Bupati Belitung 2018-2023

Melihat susunan beberapa tokoh dan pejabat dari etnis Tionghoa yang ada, banyak etnis Tionghoa yang menganggap Pulau Bangka Belitung sebagai rumah kedua mereka. Rumah pertamanya adalah asal nenek moyangnya. Namun, dengan sambutan yang baik dari etnis Melayu, orang Tionghoa Bangka Belitung semakin yakin bahwa tidak ada diskriminasi dalam bidang politik dan sosial di Bangka Belitung.

Salah satu bentuk penyesuaian etnis Tionghoa adalah dengan melakukan perkawinan eksogami antara orang Tionghoa dengan penduduk asli. Hasil observasi menunjukkan bahwa tempat tinggal di sekitar atau bahkan di desa yang sama dengan orang Melayu juga menentukan terjadinya perkawinan eksogami antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu. Hal ini berlaku untuk konteks desa, yang belum tentu berlaku untuk kehidupan dalam konteks perkotaan (Ibrahim *et al.*, 2017; 2019). Contoh desa yang banyak menunjukkan etnis Tionghoa menikah dengan Melayu adalah wilayah Sungai Selan, Lampung, dan Trubus yang terletak di

Kabupaten Bangka Tengah, Desa Pelangas, Dusun Suntai, dan Parit Tiga yang terletak di Kabupaten Bangka Barat, Desa Lumut dan Dusun Cengel yang terletak di Kabupaten Bangka Barat. Desa-desanya tersebut di atas secara geografis dan sosial dikelilingi oleh desa-desa yang sebagian besar penduduknya adalah Melayu.

Beberapa informan mengatakan bahwa lingkungan sosial mereka yang didominasi oleh orang Melayu merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan mereka sering bergaul dan berinteraksi sosial dengan orang Melayu. Bagi sebagian orang, pergaulan dan interaksi ini mengawali hubungan yang intensif. Salah satu implikasi sosialnya adalah mereka menjadi yakin satu sama lain untuk menikah. Perbedaan etnis, agama, budaya dan sebagainya, yang semula dianggap sebagai hambatan, menjadi bisa ternegosiasi. Awek, salah satu informan yang menikah dengan orang Melayu Sungai Selan, mengatakan:

*"Kami tinggal dengan mereka yang bukan Tionghoa; tak heran membuat kami dekat dan kemudian menikah" (Awak, wawancara).*

Ungkapan lain yang mengacu pada bagaimana kondisi lingkungan dan pergaulan yang erat dengan orang Melayu menyebabkan perkawinan eksogami datang dari Ayang, seorang warga etnis Tionghoa yang tinggal di Sungai Selan. Ayang mengatakan bahwa dia terbiasa berteman dengan orang Melayu dan mengira mereka sama. Mereka tidak memosisikan satu sama lain secara berbeda dalam persahabatan, sehingga pernikahan dimungkinkan.

Selama proses pergaulan dan kemudian memutuskan untuk menikah, keluarga pasangan eksogami ini, terutama yang berasal dari keluarga Tionghoa, memilih untuk mendukung hubungan mereka secara langsung. Seperti dalam kasus Ayang, dia bahkan kabur dari rumah karena tidak mendapat dukungan dari keluarganya, sehingga pada akhirnya orang tua dan saudara-saudaranya bisa dikatakan mengalah dan memilih berdamai dengan pilihan Ayang.

Ayang juga secara gamblang mengungkapkan bahwa bagi dirinya dan suaminya, perbedaan suku bukanlah masalah dalam memutuskan untuk menikah ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah nyaman. Komunikasi itu interaktif, penuh kasih sayang, dan penuh kasih. Baginya, mereka pantas untuk bersama ketika mereka saling mencintai. Pernikahan mereka tanpa syarat jika salah satu dari mereka pindah agama. Terbukti dari hasil wawancara, Ayang tetap menganut Khonghucu hingga suaminya yang beragama Islam meninggal.

Namun, tampaknya ada sedikit perbedaan antara eksogami yang umum di desa, dan kondisi di perkotaan yang relatif jarang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh proses asimilasi masyarakat di desa yang lebih mudah dibandingkan di perkotaan. Terjadinya perbedaan di tengah lingkungan tempat tinggal yang sama disebabkan oleh perbedaan karakteristik sosial antara orang Tionghoa yang tinggal di kota dan yang tinggal di desa. Mereka yang tinggal di kota cenderung memiliki ciri-ciri eksklusif dalam pergaulannya, sehingga yang terjadi adalah persahabatan, interaksi, dan pergaulan dalam lingkup sesama etnis. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh [Karmela & Pamungkas \(2017\)](#) di kota Jambi juga menunjukkan hal yang sama seperti yang terjadi pada masyarakat Tionghoa yang tinggal di kota-kota di Bangka.

#### **4. Dominasi Modal Pembentuk Habitus**

Etnisitas sering digunakan sebagai alat politik untuk bersaing satu sama lain untuk kepentingan politik dan ekonomi. [Ritau'din \(2017\)](#) berpendapat bahwa salah satu fenomena yang menarik saat ini adalah masuknya isu etnis dan agama, khususnya di ranah politik. Isu ini rawan mencederai demokrasi di Indonesia dan memicu kecemburuan dan konflik dalam

masyarakat majemuk seperti Indonesia. Selain itu, politik etnis cenderung menjadi ciptaan negara dalam melabeli warganya (Haboddin, 2012). Salim, sebagaimana dikutip dalam Zein (2000), juga mengungkapkan bahwa dari segi sejarah, persoalan etnisitas telah berlangsung sejak zaman kolonial, ketika Belanda menjadikan orang Tionghoa sebagai kelas kedua setelah Belanda dan Eropa. Sedangkan pribumi ditempatkan di kelas tiga. Akibatnya, stereotip setelah Indonesia merdeka melekat pada penduduk Tionghoa sebagai perpanjangan tangan penjajah dan seringkali menjadi alasan untuk menumpahkan kebencian kepada mereka.

Di pulau Bangka, kerukunan ini dapat ditunjukkan oleh mereka yang berada di lingkungan multietnis. Harmonis di sini diartikan sebagai suatu kondisi di mana satu individu dan individu yang lain sepakat satu sama lain, atau dapat dikatakan bahwa perbedaan antar individu telah tergerus oleh sikap toleransi yang mapan (Fernando *et al.*, 2019). Etnis Melayu dan Tionghoa merupakan populasi terbesar di Bangka Belitung. Data statistik menunjukkan komposisi Melayu dan Tionghoa mencapai 69 persen dan 11 persen (Kavin, 2017). Keakraban antara etnis Tionghoa dan Melayu terlihat pada busana pernikahan Melayu yang didominasi warna merah sebagai simbol warna keberuntungan bagi etnis Tionghoa. Selain itu, di Bangka, banyak wanita Tionghoa memakai kain dan kebaya, sebuah tradisi Melayu. Bidang kuliner juga membuktikan kedekatan kedua etnis ini (Theo & Lie, 2014). Martabak Manis, atau kue bulan atau Hok Lopan, merupakan salah satu jenis kue warisan yang menampilkan jejak-jejak budaya Tionghoa, yang berkembang seiring dengan proses akulturasi. Kue Hok Lopan atau martabak ini merupakan kue yang paling banyak dinikmati oleh seluruh penduduk di Kepulauan Bangka Belitung (Setiati, 2008). Kedekatan interaksi sosial antara kedua etnis tersebut juga diperkuat dengan kenyataan bahwa mereka akan saling mengunjungi setiap hari raya keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala dusun di Desa Pelangas, Akhiong (40 tahun), pada hari raya keagamaan masing-masing, mereka akan saling mengunjungi sehingga memang akan tetap bersilahturahmi lintas identitas.

Masyarakat Bangka telah mengakui perbedaan ini sebagai kenyataan yang tidak dapat disangkal. Pengakuan kesamaan ini menegaskan adanya simbolisasi yang berbeda namun tetap satu (Marta, 2018). Inilah asumsi dasar yang melandasi pemahaman multikulturalisme. Yang lebih menarik lagi, konflik antara Tionghoa dan Melayu jarang ditemukan di Bangka Belitung. Hal ini dibuktikan dengan kasus kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, dimana penduduk etnis Tionghoa di Bangka dilindungi sepenuhnya (Permana, 2002). Bahkan dalam literatur dan pemberitaan, belum pernah terjadi kerusuhan rasis di Bangka Belitung yang menimpa etnis Tionghoa (Theo & Lie, 2014). Johan Murod, tokoh Melayu Bangka, mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa dan Melayu Bangka sama-sama berperang melawan penjajah Belanda karena sama-sama menjadi korban jajahan yang sedang menderita saat itu (Murod, Wawancara, 29 November 2021). Tak heran jika ada semboyan Hakka "*Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong*" yang artinya orang Tionghoa dan Melayu sama dan setara.

Sebuah penelitian oleh Idi (2014) berpendapat bahwa hubungan antaretnis yang harmonis dapat terjadi tanpa "rekayasa sosial" yang sistematis. Ini memberikan pelajaran penting dengan distribusi yang adil dan merata dari struktur sosial, politik, agama dan ekonomi. Sementara itu, Pageh (2018) mengkaji pemahaman tentang kearifan sistem keagamaan lokal dalam mengintegrasikan keragaman di Bali. Harmonisasi, menurut Pageh, merupakan landasan inklusif bagi implementasi nilai-nilai agama yang kuat, khususnya agama Hindu di sana.

Penulis berasumsi bahwa modal adalah kekuatan dan menunjukkan bahwa masyarakat yang harmonis bersaing untuk saling mempengaruhi dan mengendalikan dalam ritme yang dinamis. Hanya saja dengan pengelolaan yang cerdas, kontestasi tidak berada dalam ranah diametral yang menimbulkan konflik. Dengan menggali modal budaya dan sosial, terlihat

bahwa orang Tionghoa dapat mendayung di antara peluang yang ada. Diterimanya masyarakat Melayu sebagai etnis terbesar menunjukkan kelincahan masyarakat Tionghoa dalam menerapkan strategi akulturasi secara damai dan harmonis.

Dari **Table 2** yang menunjukkan peran tokoh Tionghoa di Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya kekuatan dominasi hadir dan dimiliki oleh etnis Tionghoa. Beberapa tokoh Tionghoa yang memegang posisi publik di kalangan politisi, anggota dewan dan kepala daerah menunjukkan bahwa orang Tionghoa fleksibel dalam peran sosial mereka. Sisi minoritas, sebagai kelemahan Tionghoa di Bangka, mengubah situasi menjadi titik balik.

Harmonisasi antara Melayu dan Tionghoa menarik jaringan sosial, politik dan ekonomi Tionghoa ke dalam sistem politik, yang mempengaruhi banyak kebijakan, terutama yang berorientasi pada keberadaan kelas sosial di masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh Tionghoa dalam memegang jabatan politik dapat mempengaruhi bagaimana orang Tionghoa berperan dalam masyarakat di tengah kekuatan kuantitatif orang Melayu. Soal permodalan, orang Tionghoa Bangka memegang empat modal yang disampaikan Bourdieu secara ekonomi, sosial, budaya dan simbolis. Kehadiran empat modal memungkinkan mereka bergerak dinamis meski dalam kondisi minoritas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan kesetaraan hukum kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi etnis. Masyarakat Tionghoa di pulau Bangka sudah sangat bebas melakukan berbagai aktivitas bahkan sebelum adanya undang-undang ini. Namun secara praktis undang-undang ini memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada etnis Tionghoa di Kepulauan Bangka Belitung untuk difasilitasi sebagai warga negara, misalnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, urusan perkawinan resmi negara, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, tata usaha bisnis, dan sebagainya. Masyarakat Tionghoa juga telah resmi memeluk berbagai agama yang diakui negara, yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan sebagainya.

Etnis Tionghoa umumnya beragama Buddha dan Konghucu. Ekspresi kebebasan beragama mereka terutama lahir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Saat itu, umat Buddha dan Konghucu yang pada umumnya beretnis Tionghoa dapat dengan bebas mengekspresikan keyakinan dan peribadatannya melalui perayaan ritual seperti Cheng Beng atau sembahyang kubur dan perayaan Tahun Baru Imlek setiap tahun. Di Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai ekspresi adanya percampuran budaya Tionghoa dan Melayu, pemerintah setempat bahkan memberikan nama jalan yang ditulis dalam tiga bahasa, Indonesia, Arab, dan Mandarin. Kebijakan ini secara tegas menyampaikan bahwa berbagai agama dan etnis mendiami wilayah tersebut dengan kedudukan kewarganegaraan yang setara.

Berdasarkan temuan observasi yang dilakukan, interaksi yang terjalin khususnya antara orang Melayu dan Tionghoa adalah dalam bidang perdagangan. Di pasar, mereka saling berinteraksi baik sebagai pedagang maupun pembeli dan pedagang. Orang Tionghoa umumnya menjual hasil pertanian berupa sayur-sayuran, peralatan dapur, dan juga rempah-rempah. Sedangkan orang Melayu umumnya menjual ikan, pakaian dan pelaku usaha kecil lainnya. Bahkan jika ditelisik lebih jauh, ternyata banyak juga etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai petani, tukang kebun, peternakan, buruh dan nelayan. Mereka melakukan interaksi sosial melalui perdagangan, dan merupakan tempat terbuka untuk berinteraksi. Setidaknya ada dua pasar di Bangka, yaitu pasar terbuka tempat etnis Melayu, Tionghoa, dan etnis lainnya berinteraksi dalam transaksi jual beli. Kadang-kadang, orang Tionghoa akan menggunakan

bahasa Hakka untuk melayani sesama pembeli Tionghoa dan akan bergangi menggunakan dialek Melayu ketika berbicara dengan orang Melayu. Pasar kedua adalah pasar tertutup atau pasar kaget. Komoditas yang dijual di pasar ini cenderung lebih khas Tionghoa (non halal), misalnya daging babi, Durian Cumasi, Kue Tahun Baru Imlek (populer sebagai Kue Keranjang atau Dodol Cina di Indonesia), mie *tek fu* dan sebagainya.

Selain itu, beberapa orang Tionghoa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bahkan Kepala Dinas. Adanya etnis Tionghoa yang menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah di Pulau Bangka menunjukkan tidak adanya diskriminasi etnis dalam rekrutmen pegawai. Kerjasama bisnis juga dapat menunjukkan adanya kemitraan antara Melayu dan Tionghoa di bidang ekonomi. Etnis Tionghoa dengan modal keuangan bermitra dengan Melayu yang memasok bahan baku atau tenaga kerja. Banyak orang Melayu bekerja untuk orang Tionghoa sebagai pegawai atau pekerja bangunan. Selain sektor perdagangan, interaksi terjadi di sektor pertambangan tradisional yang dikenal dengan istilah tambang inkonvensional. Tambang inkonvensional adalah tambang rakyat yang digerakkan oleh individu. Umumnya mereka menambang secara ilegal bahkan di areal bekas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Diketahui bahwa orang Tionghoa yang datang ke Bangka pada umumnya bekerja sebagai penambang timah. Orang Tionghoa biasanya menyediakan sarana dan prasarana untuk penambangan timah inkonvensional, sedangkan orang Melayu adalah pekerjanya. Hampir di seluruh wilayah Bangka Belitung terdapat tambang inkonvensional, dan wilayahnya semakin luas, bahkan hingga tambang laut. Sentra penambangan timah terbesar adalah Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Sedangkan untuk wilayah Pangkalpinang dan Belitung, pemerintah daerah dengan tegas menolak penambangan timah dan sering melakukan razia, sehingga banyak penambang yang mengungsi ke kabupaten lain yang longgar pengawasan dari aparat. Banyak toko-toko Tionghoa di Sungailiat dan juga Pangkalpinang yang menyediakan alat-alat penambangan timah ini. Meskipun sebagian besar orang Tionghoa berdagang, tidak ada sentimen rasial yang menimbulkan masalah dalam transaksi jual beli. Orang Melayu dan Tionghoa saling berdagang sebagai bentuk interaksi simbolik sebagai modal sosial untuk kesetaraan dalam interaksi sosial.

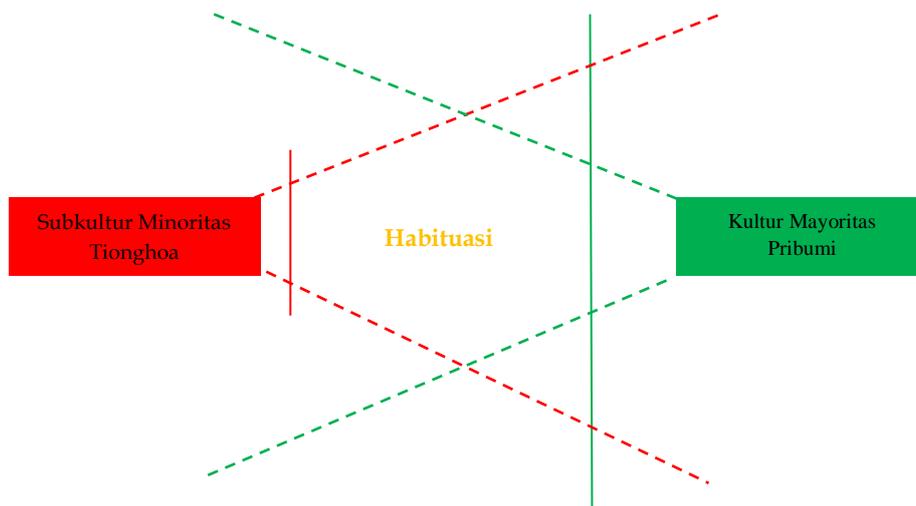
Di bidang politik, kebanyakan orang Tionghoa enggan memasukinya. Bahkan dalam pemilihan umum, orang Tionghoa cenderung tertutup. Namun, hal ini tidak menunjukkan adanya sikap politik masyarakat Tionghoa seperti pada masa Orde Baru. Bukti partisipasi aktif masyarakat Tionghoa terlihat dari banyaknya tokoh Tionghoa yang menduduki jabatan politik di tengah mayoritas pemilih Melayu. Di Kabupaten Bangka, tokoh-tokoh Tionghoa menjadi anggota Dewan, seperti Agung Setiawan, Riniarti Sajuni, Budiono, Junaidi Surya, dan Tjindriajana. Di Kabupaten Bangka Tengah, Me Hoa menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah periode 2019-2024. Di Kabupaten Bangka Barat, Bong Ming Ming adalah Wakil Bupati Bangka Barat.

Meski mayoritas etnis Melayu mencalonkan diri dalam pemilihan umum, tingkat elektabilitas etnis Tionghoa dikatakan lebih tinggi daripada etnis Melayu sendiri. Biasanya mereka memanfaatkan ikatan kekerabatan, misalnya dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan, pemilihan kepala desa dan sebagainya. Sejak presiden Abdurrahman Wahid, banyak etnis Tionghoa yang aktif dalam politik. Banyak orang Tionghoa yang aktif mencalonkan diri sebagai calon terpilih di setiap pemilihan umum. Menariknya, banyak orang Melayu yang menjadi tim sukses calon etnis Tionghoa. Bahkan politikus Tionghoa Rudianto Tjen berkali-kali terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beberapa politisi Melayu berkelakar bahwa Rudianto Tjen adalah anggota

abadi DPR RI dari Kepulauan Bangka Belitung (Johan Murod, Wawancara, 25 November 2021). Kekhawatiran tentang kebangkitan istilah pribumi dan non-pribumi sebagai wacana baru yang dimunculkan oleh para kandidat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Chen (2021), tampaknya tidak terjadi dalam konteks elektoral di pulau Bangka. Faktanya, reklamasi istilah pribumi dalam proses pemilu adalah hal yang 'tidak bermoral', tidak substansial sebagai masalah kesetaraan antaretnis. Tentu ada bias, namun selama dimainkan sebagai gerakan ketakutan dalam persaingan yang tidak mendapatkan ruang optimal bagi pemilih, menunjukkan bahwa identitas, apapun bentuk dan objeknya, tetap menjadi warna kontestasi demokrasi di mana karakteristik prosedural masih menjadi indikator.

Etnis Melayu dan Tionghoa yang tinggal di Pulau Bangka tampaknya menyadari bahwa interaksi yang ada merupakan hasil yang terpahat secara bersamaan. Kontestasi *soft* antara Tionghoa dan Melayu tercipta karena secara historis mereka terikat satu sama lain. Perasaan senasib, apalagi saat penjajahan terjadi di Bangka Belitung, membuat mereka memiliki ikatan batin. Selain itu, tradisi perkawinan yang semakin melebar menjadi istilah pendukung masuknya toleransi yang lebih kuat. Sentimen etnis akhirnya tidak muncul ke permukaan, meski mayoritas Melayu menguasai modal sosial, politik dan ekonomi. Pemerintah daerah juga melakukan kebijakan yang pro pemerataan, terutama terkait rekrutmen pegawai, tunjangan sosial, pendidikan, peluang politik, dan lain-lain. Secara budaya, sembahyang kubur atau perayaan Cheng Beng semarak bahkan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Mereka menyadari bahwa potensi budaya yang ada melalui tradisi Cheng Beng dan Imlek turut mendorong perekonomian masyarakat ke arah yang lebih positif, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bangka.

Habitus demikian dibentuk sebagai bagian dari proses penguasaan modal oleh etnis Tionghoa sehingga relatif diterima dengan baik di tengah dominasi penduduk lokal yang umumnya Melayu. Penguasaan modal ini merupakan modal dasar pembentukan kekuatan etnis Tionghoa untuk berkecimpung di lapangan sehari-hari dan hampir di semua sektor kehidupan.



Skema 1. Habitulasi Subkultur Tionghoa

Merujuk pada Buordieu (1990), empat modal yang dimiliki etnis Tionghoa terbentuk dari empat pilar utama: modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Dari segi modal ekonomi, jika di akar rumput, etnis Tionghoa cenderung menjadi figur pekerja dan

membentuk harmonisasi antaretnis dengan inklusivitas ekonomi, di perkotaan, mereka memegang posisi sentral sebagai pelaku utama perdagangan. Dengan modal tersebut, mereka tidak hanya memiliki kapasitas ekonomi yang cukup kuat, tetapi juga relatif dianggap sebagai orang-orang *'the have'* yang telah mendorong kuatnya akses mereka ke sektor ekonomi. Penguasaan aspek ekonomi ini pada akhirnya dianggap sebagai konsekuensi dari pengelompokan tempat tinggal, suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakat adat berada dalam kondisi yang hampir sama, sehingga penguasaan ekonomi tidak dianggap sebagai masalah besar. Sedangkan dalam aspek sosial, mereka cenderung diterima dan berbaur dengan semua strata karena mereka juga membentuk pengelompokan sosial dari sisi strata sosial. Di tingkat elit, etnis Tionghoa cenderung membaaur dan tidak membangun eksklusivitas sosial secara terbuka. Tak heran jika para elit Tionghoa banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan kemudian menjalin hubungan yang kuat dengan prinsip kesetaraan. Dari segi budaya, sejarah panjang penduduk di pulau Bangka tidak lepas dari kehadiran etnis Tionghoa, sehingga mereka juga memberikan pengaruh budaya yang kuat pada masyarakat setempat. Berbagai tradisi budaya, kuliner, dan dialek lokal tak terhindarkan mempengaruhi budaya lokal. Adapun simbolnya, orang Tionghoa dianggap sebagai warga negara yang kuat secara ekonomi, memiliki jaringan etnis yang kuat, dan kini cenderung dianggap memiliki legitimasi yang kuat dengan menguasai posisi politik tertentu.

**Skema 1** di atas menunjukkan bahwa proses habituasi telah mendorong diterimanya subkultur minoritas Tionghoa sebagai mayoritas. Merujuk pada Bourdieu, proses habituasi terbentuk dalam jangka panjang di mana struktur objektif dan fenomena subjektif bersatu membentuk kolektivitas realitas sosial. Maka dari itu, penelitian ini ingin berjarak dengan penelitian [Anggraeni \(2011\)](#) yang mengatakan bahwa meskipun ingin melupakan perbedaan, orang Tionghoa tetap membutuhkan paradigma yang berbeda dalam mewadahi identitas Tionghoa dalam konteks sosial. Penelitian ini mengacu pada habituasi yang berusaha membentuk paradigma penerimaan khusus, khususnya dalam konteks pulau Bangka.

Habitulasi subkultur etnis Tionghoa ini dapat dikatakan ditandai dengan penguasaan empat modal yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai subkultur yang berpengaruh. Jika melihat ulasan pada bagian sebelumnya, habituasi ini terbentuk secara perlahan dan bukan proses perubahan yang dramatis, sehingga bersifat transformatif. Kecenderungan dominasi subkultur minoritas di tengah dominasi ini menunjukkan bahwa pembentukan habituasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama dengan dukungan budaya mayoritas yang cenderung terbuka. Adanya kesamaan, baik dalam modal ekonomi, modal sosial, modal budaya maupun modal simbolik, menunjukkan adanya pembagian peran yang relatif mulus sehingga tidak menimbulkan resistensi yang kuat. Politik berbagi adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi pembentukan habituasi.

Pada tataran modal ekonomi, politik berbagi ditandai dengan pengelompokan etnis Tionghoa, yang tidak selalu mengacu pada dominasi di bidang ekonomi. Kebanyakan orang yang menguasai sektor ekonomi di perkotaan juga mengambil kendali ekonomi yang hampir sama. Dalam modal sosial, berbagi solidaritas dan inklusivitas elit merupakan indikator politik berbagi, yaitu berbagi peran, berbagi peluang dan akses. Sedangkan di bidang kebudayaan, penyebaran pengaruh berlangsung lebih lama dengan akulturasi yang harmonis dalam waktu yang lama. Di sektor modal simbolik, banyak terjadi pertukaran mengenai kekuasaan politik yang masih terbagi dan simbol-simbol lainnya, termasuk status sosial, otoritas dan legitimasi politik.

Politik berbagi peran merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan peran masing-masing tidak saling meniadakan. Berbagi peran dengan model kompetitif yang

dipelihara secara demokratis menjamin bahwa konteks mayoritas dan minoritas tidak meningkat menjadi konflik identitas. Selama politik berbagi ini dapat berjalan dengan elegan dan tidak berorientasi pada dilema antara tanah air, kewarganegaraan, dan tempat tinggal, seperti yang dikhawatirkan Lan (2017), pengerasan identitas yang mengarah pada prasangka yang berbalut kebencian tidak akan terjadi.

## 5. Kesimpulan

Keberadaan etnis Tionghoa di pulau Bangka merupakan jalinan sejarah yang panjang. Praktik-praktik dalam kehidupan sosial antara Tionghoa dan Melayu terjalin dengan baik secara harmonis. Namun, beberapa kontestasi saling mempengaruhi dan relasi yang terasa dominan. Dalam praktiknya, Tionghoa dapat memainkan peran yang baik, terutama dari sudut pandang permodalan yang dihadirkan Bourdieu. Etnis Tionghoa dapat menguasai seluruh modal yang ada, dengan bukti dominasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Akomodasi politisi Tionghoa terpilih dalam jabatan publik adalah bukti yang tak terbantahkan. Di bidang sosial dan budaya, banyak tradisi Tionghoa yang mulai diterima dengan baik oleh orang Melayu. Kehadiran sekolah ala Tionghoa di Bangka juga mempertegas kehadiran kekuatan dominatif ini.

Sementara itu, di bidang ekonomi, mayoritas pelaku ekonomi di pusat kota Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan, dan Sungailiat adalah etnis Tionghoa. Semboyan "*Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong*" dianggap sebagai mantra ampuh yang memberikan legitimasi budaya kepada etnis Tionghoa Bangka dari tidak adanya praktik diskriminatif. Kolaborasi yang baik menciptakan kerukunan, meskipun sebagian etnis Tionghoa dan Melayu masih berpegang pada identitas yang saling terkait, bahkan secara tatap muka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa habituasi Etnis Tionghoa sebagai subkultur yang diterima secara luas oleh budaya mayoritas telah dilakukan dengan penguasaan modal yang baik oleh Etnis Tionghoa. Habituasi ini didukung oleh politik berbagi peran yang telah dipraktikkan sejak lama dengan dinamika perubahan yang terjadi sebagai bagian dari realitas sosial. Habituasi yang berjalan dengan baik itulah mengapa meski terasa seperti dominasi subkultur, namun keberadaan etnis Tionghoa tidak dihadapkan pada perlawanan seperti di banyak daerah lainnya.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia bekerja sama yang sebesar-besarnya selama penelitian ini berlangsung.

## 7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

Anggraeni, D. (2011). Does multicultural Indonesia include its ethnic Chinese?. *Wacana*, 13(2), 256-278. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/181186-EN-does-multicultural-indonesia-include-its.pdf>

- Aryodiguno, H. (2019). Changes in Chinese-Indonesian Identity: Indonesianization or Re-Sinicization? *AEGIS: Journal of International Relations*, 3(1), 1-21. <https://doi.org/10.33021/aegis.v3i1.728>
- Bakhri, A. S., & Hanubun, Y. R. (2019). Pendekatan Kualitatif, Paradigma, Epistemologi, Teori dan Aplikasi. In *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (pp. 172-194). Yogyakarta, Indonesia: Gawe Buku.
- Brahma, S. (2018). The Position of Ethnic Tionghoa in Indonesia. *IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL)*, 6(8), 269-276. Retrieved from <https://oaji.net/articles/2017/488-1535975182.pdf>
- Bourdieu, P. (1990). *In Other Words: Essay Towards a Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Chen, J. (2021). Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post-Reform Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(1), 59-87. <https://doi.org/10.1177/18681034211036716>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: SAGE.
- Cribb, R., & Coppel, C. A. (2009). A genocide that never was: explaining the myth of anti-Chinese massacres in Indonesia, 1965-66. *Journal of Genocide Research*, 11(4), 447-465. <https://doi.org/10.1080/14623520903309503>
- Darwance, D., Nugroho, S., & Yokotani, Y. (2018). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pengaturan Pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Dari Zaman VOC Hingga Indonesia Merdeka. *UNEJ E-Proceeding*, 536-549. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6716>
- Erman, E. (2007). Deregulasi tata niaga timah dan pembuatan negara bayangan lokal; Studi kasus Bangka. In G. V. K. H. Schulte Nordholt (Ed.), *Politik lokal di Indonesia*.
- Erman, E. (2008). *Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island*. *Southeast Asia: History and Culture* (No. 37-2008). Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/265323185\\_Rethinking\\_Legal\\_and\\_Illegal\\_Economy\\_A\\_Case\\_Study\\_of\\_Tin\\_Mining\\_in\\_Bangka\\_Island](https://www.researchgate.net/publication/265323185_Rethinking_Legal_and_Illegal_Economy_A_Case_Study_of_Tin_Mining_in_Bangka_Island)
- Erman, E. (2009). *Dari Pembentukan Kampung Ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta, Indonesia: Ombak. Retrieved from [http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=2513](http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2513)
- Erman, E. (2017). Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka-Belitung (1920-1950). *Masyarakat Indonesia*, 36(1), 1-28. Retrieved from <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/625>
- Fashri, F. (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Buordieu*. Yogyakarta, Indonesia: Juxtapose.
- Fernando, J., Sya, M., & Marta, R. F. (2019). Amalgamation as a Strengthening Ethic. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 334-341. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4863>
- Giddens, A. (1997). *Central Problem in Social Theory*. Berkeley: University of Chicago Press.
- Given, L. M. (2008). *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Los Angeles: SAGE.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109-126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Heidhues, M. F. S. (1992). *Bangka Tin and Mentok Pepper: Tionghoa Settlement on an Indonesian Island*. Singapore: Institute of South Asian Studies. Retrieved from <https://www.amazon.com/Bangka-Tin-Mentok-Pepper-Settlement/dp/9813035994>

- Heidhues, M. F. S. (2008). *Timah Bangka dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Ibrahim. (2013). *Bisnis, kekuasaan, dan Identitas: Studi Terhadap perilaku Politik Etnis Tionghoa di Bangk Belitung Pasca Orde Baru*. Yogyakarta, Indonesia: FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Ibrahim, I., Rendy, R., Sujadmi, S., Saputra, P. P., & Febriani, L. (2017). *Fan Ngin Tong Ngin Tjit Jong The Assimilation Face of Grassroot of Chinese Ethnic in Bangka Island, Indonesia* (SHS Web Conference, Vol. 76). <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207601013>
- Ibrahim, I., Pratama, S., Saputra, P. P., & Rendy, R. (2019). *The Politics of Indonesian Chinese at Grassroots Level (A Study of the Village Head of Indonesian Chinese in Bangka Islands)* (Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)). <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.49>
- Idi, A. (2014). Harmoni Sosial: Interaksi Sosial Natural-Asimilatif antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 13(2), 361-383. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/download/71/74>
- Kavin, R. (2017). Politik Lokal di Bangka Belitung: Antara Timah dan Etnis Tionghoa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 75-92. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/84>
- Karmela, S. H., & Pamungkas, S. (2017). Kehidupan Sosial Ekonomi Orang-orang Tionghoa Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 7(1), 55-62. Retrieved from <http://dikdaya.unbari.ac.id/index.php/dikdaya/article/view/30>
- Lan, T. J. (2017). Tionghoa Indonesia and China-Indonesia Relations: A Juxtaposition of Identity and Politcs. *Masyarakat Indonesia*, 43(2), 198-206. Retrieved from <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/738/509>
- Marta, R. F. (2018). Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(01), 23-31. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v4i01.1649>
- Miles, B. M., & Huberman, M. A. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nugroho, Y. A. (2013, November 29). Peranakan Tionghoa di Bangka-Belitung. *Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama Di Indonesia*. Retrieved from <https://historia.id/kultur/articles/peranakan-tionghoa-di-bangka-belitung-6keRv>
- Permana, N. A. (2002). Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah. *Antropologi Indonesia*, 68(1), 18-21. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3439>
- Pageh, I. M. (2018). Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 88-98. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19411>
- Priyono, H. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reid, A. (2009). Escaping the burdens of Chineseness. *Asian Ethnicity*, 10(3), 285-296. <https://doi.org/10.1080/14631360903189666>
- Ritau'din, M. S. (2017). Teologi Politik Berbalu SARA Antara Ambisi dan Konspirasi. *KALAM*, 11(1), 85-106. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.1087>

- Setiati, D. (2008). *Makanan Tradisional Masyarakat Bangka Belitung*. S. Rohana, (Ed). Tanjung Pinang, Indonesia: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.
- Siem, T. H. (2017). Chinese correspondence in Dutch East Indies (1865-1949). *Wacana*, 18(2), 343-384. <https://doi.org/10.17510/wacana.v18i2.588>
- Suharnomo, S. (2017). Understanding Business Behavior of the Chinese Indonesian: A Study Using Hofstede's Cultural Framework. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 8(1) 2017, 11-19. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/10407>
- Swartz, D. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Sya, M., Marta, R. F., & Sadono, T. P. (2019). Tinjauan Historitas Simbol Harmonisasi Antaretnis Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 153-168. <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.23517>
- Theo, R., & Lie, F. (2014). *Kisah, Kultur, dan Tradisi Tionghoa Bangka*. Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.
- Turner, S. (2003). Setting the Scene Speaking Out: Chinese Indonesians After Suharto. *Asian Ethnicity*, 4(3), 337-352. <https://doi.org/10.1080/1343900032000117187>
- Turner, S., & Allen, P. (2007). Chinese Indonesians in a rapidly changing nation: Pressures of ethnicity and identity. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 112-127. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2007.00334.x>
- Umar, U. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Zaenudin, M. N. (2016). Representasi Tema Subkultur Indonesia dalam Karya Seniman Bandung Periode 2010-2015, Studi Kasus Karya Seni Ranadireksa, Henrycus Napit Sunargo, Mufti Priyanka, Panca Dwinandhika Zen, dan Radi Arwinda). *E-Proceedings of Art & Design*, 3(2), 299-309. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/299909904.pdf>
- Zein, A. B. (2000). *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Gema Insani.

---

### Tentang Penulis

- Ibrahim** memperoleh gelar Doktor dalam bidang Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2012 dan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung dari tahun 2014 hingga 2020 dan sekarang menjadi Rektor Universitas Bangka Belitung dari tahun 2020 hingga 2024. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .  
E-Mail: [iim\\_babel@yahoo.com](mailto:iim_babel@yahoo.com)

2. **Arief Hidayat** memperoleh gelar Magister dalam bidang Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2020. Penulis adalah mahasiswa program doktor pada program studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-Mail: [ariefcrbn@gmail.com](mailto:ariefcrbn@gmail.com)
  
3. **Herza** memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sosiologi dari Universitas Bangka Belitung, Indonesia, pada tahun 2016 dan gelar Magister dalam bidang Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2019. Penulis adalah dosen pada program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. E-Mail: [herzazul@ubb.ac.id](mailto:herzazul@ubb.ac.id)